

**EVALUASI PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA
AGRIBISNIS PERTANIAN (PUAP) PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2014**

Sholih Nugroho Hadi,S.ST

Ringkasan

Evaluasi adalah suatu proses untuk membuat penilaian secara sistematis mengenai suatu kebijakan, program, proyek atau kegiatan berdasarkan informasi dan hasil analisis dibandingkan terhadap relevansi, keefektifan biaya, dan keberhasilannya untuk keperluan pemangku kepentingan. Tujuan evaluasi program PUAP adalah mengetahui tingkat keberhasilan Program PUAP di Kalimantan Selatan di lihat dari output (keluaran) dan outcome (hasil). Evaluasi Program PUAP di Laksanakan pada bulan Februari 2014. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive. Penelitian dilakukan terhadap gapoktan penerima BLM-PUAP tahun 2008 sampai dengan tahun 2012 di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tapin, Tanah Laut, Kota Banjarbaru dan Kota Banjarmasin. Data yang dikumpulkan meliputi data primer dan sekunder. Data primer yang dimaksud antara lain data penyaluran dana BLM-PUAP, data perkembangan aset gapoktan, data anggota peminjam, dan data penumbuhan LKM-A. Analisis data yang digunakan adalah diskriptif analitis. Hasil evaluasi output menunjukkan semua pengurus gapoktan penerima PUAP dan pendamping PUAP (PP dan PMT) sudah mendapatkan sosialisasi dan pelatihan. Dalam penyaluran dana BLM-PUAP sebanyak 362 gapoktan (39,05%) mempunyai kriteria baik, sebanyak 385 gapoktan (41,53%) mempunyai kriteria sedang dan sebanyak 180 gapoktan (19,42%) mempunyai kriteria kurang. Evaluasi outcome menunjukkan dalam perkembangan aset gapoktan sebanyak 28,9% gapoktan mempunyai kriteria baik, sebanyak 40,8% mempunyai kriteria sedang, dan sebanyak 30,2% mempunyai kriteria kurang. Anggota gapoktan yang memanfaatkan PUAP kurang lebih 45% dari jumlah semua anggota. Dana BLM-PUAP di Provinsi Kalimantan Selatan dimanfaatkan untuk usaha agribisnis tanaman pangan sebesar 48,38%, perkebunan sebesar 8,7%, hortikultura sebesar 4,5%, peternakan sebesar 22,56%, dan offfarm. sebesar 15,82%.

Kata kunci : Evaluasi, Output, Outcome

Kata Pengantar

Program PUAP sudah berjalan tujuh tahun sejak pertama kali digulirkan tahun 2008. Program ini sudah merambah sampai pelosok desa kelurahan di kabupaten maupun kota se-Provinsi Kalimantan Selatan. Sampai saat ini sebanyak 1.487 dari 2008 desa kelurahan atau sebesar 74% sudah mendapatkan alokasi dana PUAP. Program PUAP merupakan bentuk fasilitasi bantuan modal usaha bagi petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani yang dikoordinasikan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Tujuan Program PUAP yaitu mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah.

Gapoktan diharapkan mampu menumbuhkan lembaga keuangan mikro untuk memberikan pinjaman pembiayaan usaha pertanian produktif petani anggota. Sehingga petani dapat meningkatkan produktivitas usaha agribisnis baik melalui intensifikasi maupun ekstensifikasi.

Namun dalam perkembangannya, sejauh mana perkembangan keberhasilan Program PUAP di Provinsi Kalimantan Selatan belum bisa diketahui. Untuk itu buku ini hadir untuk memberikan gambaran hasil evaluasi mengenai tingkat keberhasilan program PUAP berdasarkan output dan outcome. Penulis sengaja akan membeberkan bagaimana penyaluran dana PUAP, perkembangan aset gapoktan setelah menerima PUAP, keberhasilan dalam penumbuhan LKM-A, dan seberapa jauh jangkauan Program PUAP mampu memberikan fasilitasi modal anggota serta dukungan program dalam mendukung usaha agribisnis.

Meskipun penulis telah berusaha keras agar buku ini tampil baik dan informatif namun penulis menyadari masih memiliki kekurangan. Karenanya, saran dan kritik pembaca sangat diharapkan untuk perbaikan kedepan.

Banjarbaru, Desember 2014

Penulis

Daftar Isi

| | Halaman |
|---|---------|
| Ringkasan | ii |
| Kata Pengantar | iii |
| Daftar Isi | iv |
| Daftar Tabel | v |
| Daftar Gambar | vi |
| I. PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 2 |
| C. Tujuan | 2 |
| D. Manfaat | 2 |
| II. TINJAUAN PUSTAKA | 3 |
| A. Evaaluasi..... | 3 |
| B. Program PUAP..... | 5 |
| III. METODOLOGI | 6 |
| A. Lokasi dan Waktu Penelitian | 7 |
| B. Metode Pengumpulan Data..... | 7 |
| C. Metode Pengambilan Sampel | 8 |
| D. Metode Analisis Data | 9 |
| IV. HASIL DAN PEMBAHASAN | 10 |
| A. Gambaran Umum Wilayah | 10 |
| B. Pelaksanaan Program PUAP di Kalimantan Selatan | 11 |
| C. Evaluasi Output | 12 |
| D. Evaluasi Outcome | 13 |
| V. SIMPULAN DAN SARAN | 14 |
| A. Simpulan | 15 |
| B. Saran..... | 15 |
| DAFTAR PUSTAKA | 16 |

Daftar Tabel

| Tabel | Halaman |
|---|---------|
| 1. Rekapitulasi gapoktan penerima BLM-PUAP di Kalimantan Selatan..... | 10 |
| 2. Data ketersediaan tenaga PMT dibanding jumlah gapoktan..... | 11 |

Daftar Gambar

| Gambar | Halaman |
|--|---------|
| 1. Peta Kalimantan Selatan | 1 |
| 2. Alur usulan calon gapoktan penerima BLM-PUAP..... | 25 |
| 3. Alur proses verifikasi dokumen pencairan dana BLM-PUAP dan proses transfer dana ke rekening gapoktan..... | 26 |
| 4. Persentase criteria gapoktan 2008-2012 berdasarkan penyaluran..... | 24 |
| 5. Rekapitulasi jumlah gapoktan dalam kriteria penyaluran dana PUAP per Kabupaten kota..... | 26 |
| 6. Rekapitulasi jumlah gapoktan berdasarkan penyaluran per tahun | 27 |
| 7. Jumlah gapoktan berdasarkan kriteria perkembangan aset | 24 |
| 8. Jumlah gapoktan berdasarkan perkembangan aset per kabupaten kota. | 25 |
| 9. Rekapitulasi keberhasilan penumbuhan LKM-A | 27 |
| 10. Rekapitulasi anggota yang sudah memanfaatkan dana PUAP..... | 28 |
| 11. Persentase pemanfaatan BLM-PUAP di Kalimantan Selatan berdasarkan usaha agribisnis | 30 |
| 12. Pemanfaatan dana BLM-PUAP berdasarkan usaha agribisnisnya dilihat per kabupaten/ kota..... | 31 |

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Badan Pusat Statistik (BPS) pada bulan Maret 2013 mencatat bahwa jumlah penduduk miskin di Indonesia sebesar 28,07 juta jiwa (11,37 persen). Sebagian besar penduduk miskin berada di perdesaan yang bermata pencaharian sebagai petani. Kemiskinan di perdesaan akan terus menjadi masalah pokok nasional sehingga penanggulangan kemiskinan tetap menjadi program prioritas untuk tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Oleh karena itu pembangunan ekonomi nasional berbasis pertanian dan perdesaan secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak pada pengurangan penduduk miskin.

Permasalahan mendasar yang dihadapi petani adalah kurangnya akses kepada sumber permodalan, pasar dan teknologi serta organisasi tani yang masih lemah. Selama ini petani kesulitan untuk mendapatkan fasilitasi pembiayaan dari lembaga keuangan. Hal ini dikarenakan lembaga keuangan selalu menganggap usaha pertanian mempunyai resiko yang tinggi. Selain itu petani kesulitan untuk memenuhi persyaratan administrasi yang disyaratkan lembaga keuangan terutama anggunan.

PUAP merupakan bentuk fasilitasi bantuan modal usaha bagi petani anggota, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani yang dikoordinasikan oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan). Tujuan Program PUAP yaitu mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah.

Pemerintah telah menggulirkan Program PUAP selama tujuh tahun yang dimulai tahun 2008. Lebih dari 50.000 desa di Indonesia sudah mendapatkan dana program PUAP. Provinsi Kalimantan Selatan sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2014 sudah mendapatkan alokasi dana PUAP sebanyak 1.487 desa atau sebesar 148,7 miliar rupiah. Akan tetapi dana yang sekian itu belum diketahui apakah mampu memberikan pengaruh terhadap terhadap petani dan organisasi petani. Oleh karena itu penulis berpandangan penting untuk dilakukan "Evaluasi Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Di Kalimantan Selatan".

B. Rumusan Masalah

Dengan adanya uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang akan dilakukan evaluasi dalam pelaksanaan Program PUAP di Kalimantan Selatan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah tingkat keberhasilan Program PUAP di Kalimantan Selatan di lihat dari output (keluaran)?
2. Bagaimanakah tingkat keberhasilan Program PUAP di Kalimantan Selatan di lihat dari outcome (hasil)?

C. Tujuan

1. Mengetahui tingkat keberhasilan Program PUAP di Kalimantan Selatan di lihat dari output (keluaran)?
2. Mengetahui tingkat keberhasilan Program PUAP di Kalimantan Selatan di lihat dari outcome (hasil)?

D. Manfaat

Manfaat kegiatan evaluasi Program PUAP antara lain :

1. Untuk mendapatkan gambaran perkembangan Program PUAP di Kalimantan Selatan
2. Menjadi bahan pertimbangan kebijakan pengembangan Program PUAP di waktu yang akan datang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Evaluasi

Evaluasi adalah suatu proses untuk membuat penilaian secara sistematis mengenai suatu kebijakan, program, proyek atau kegiatan berdasarkan informasi dan hasil analisis dibandingkan terhadap relevansi, keefektifan biaya, dan keberhasilannya untuk keperluan pemangku kepentingan (Suharyadi, 2007). Salah satu kriteria yang digunakan pada penilaian dalam evaluasi adalah hasil (outcomes) yaitu apakah terjadi perubahan indikator-indikator utama tujuan program (membaik atau tidak), berapa banyak perubahannya, serta apakah perubahan tersebut disebabkan oleh program.

Evaluasi menurut Suryahadi (2007) terbagi menjadi 2 jenis, yakni :

1. Menurut waktu pelaksanaan :
 - a. Evaluasi Formatif, yaitu dilaksanakan pada waktu pelaksanaan program, bertujuan untuk memperbaiki pelaksanaan program, sehingga akan ditemukan masalah-masalah dalam pelaksanaan program.
 - b. Evaluasi Summatif, yaitu dilaksanakan pada saat pelaksanaan program sudah selesai, bertujuan untuk menilai hasil pelaksanaan program, sehingga akan ditemukan capaian dalam pelaksanaan program.
2. Menurut Tujuan
 - a. Evaluasi proses : bagaimana program berjalan dengan fokus pada masalah penyampaian pelayanan (service delivery).
 - b. Evaluasi biaya-manfaat : mengkaji biaya program relatif terhadap penggunaan sumberdaya dan manfaat program.
 - c. Evaluasi dampak : apakah program dapat memberikan pengaruh yang diinginkan.

Menurut Gardiner dkk (2007), setiap jenis kebijakan termasuk diantaranya kebijakan Pro-Miskin membutuhkan pengawasan terhadapnya. Pengawasan tersebut meliputi pemantauan, penilaian dan analisa dampak. Pemantauan dan penilaian dilakukan terhadap satu kebijakan berdasarkan hasil yang diperoleh dari pelaksanaan kebijakan tersebut. Hasil yang diperoleh dapat dibedakan menjadi dua, yang masing-masing menjadi indikator dalam proses pemantauan dan penilaian.

Pertama Output, yakni alat pemantauan, merupakan target antara yang menunjukkan sejauh mana kebijakan tersebut dilaksanakan. Misalnya dalam

kebijakan peningkatan akses pendidikan output yang diharapkan adalah bertambahnya jumlah sekolah.

Kedua Outcome, yakni alat dalam penilaian atau evaluasi, merupakan target hasil dari tujuan antara - output - yang juga merupakan tujuan kebijakan itu sendiri (menunjukkan efektifitas kebijakan tersebut). Misalnya dalam kebijakan peningkatan akses pendidikan, outcome yang diharapkan dari bertambahnya jumlah sekolah adalah meningkatnya angka partisipasi sekolah yang sekaligus menunjukkan adanya perubahan yang lebih baik pada akses terhadap pendidikan. Dalam pelaksanaan evaluasi, terdapat beberapa tahap pekerjaan yang perlu dilakukan. Untuk memperoleh hasil evaluasi yang efektif, penting untuk memastikan bahwa setiap tahap pekerjaan ini dilaksanakan dengan benar (Suryahadi, 2007). Tahapan proses evaluasi adalah sebagai berikut :

1. Menentukan tujuan evaluasi. Sebuah evaluasi perlu memiliki tujuan yang jelas. Tujuan evaluasi yang jelas akan membantu dalam penyusunan desain evaluasi yang sesuai. Dalam menentukan tujuan evaluasi, perlu mempertimbangkan berbagai konteks yang relevan, baik berkaitan dengan tujuan program itu sendiri maupun tujuan kebijakan yang lebih luas.
2. Menyusun desain evaluasi yang kredibel. Tahap ini terdiri dari beberapa langkah: (a) menentukan indikator dan tolak ukur yang akan digunakan dalam evaluasi untuk mengukur keberhasilan program; (b) menentukan metode analisis yang akan digunakan dalam evaluasi dan kebutuhan data, termasuk cara pengumpulannya; (c) menentukan jadwal pelaksanaan kegiatan evaluasi; dan (d) menghitung perkiraan biaya yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh kegiatan evaluasi.
3. Mendiskusikan rencana evaluasi. Pihak-pihak yang pertama kali perlu diajak berdiskusi mengenai rencana evaluasi adalah penyandang dana program dan pelaksana program. Mereka perlu dilibatkan sejak awal agar dapat membantu pelaksanaan evaluasi dan tidak justru sebaliknya menghambat kegiatan ini. Di samping itu perlu juga mendiskusikan rencana evaluasi, terutama rencana desain evaluasi, dengan ahli evaluasi yang berkompeten untuk memperoleh masukan mengenai hal-hal yang perlu diperbaiki dari rencana desain evaluasi yang telah disusun.
4. Menentukan pelaku evaluasi. Setelah rencana evaluasi mendapat persetujuan dari berbagai pihak yang berkepentingan, langkah selanjutnya adalah memilih

orang atau lembaga yang akan ditugaskan untuk melakukan evaluasi. Pelaku evaluasi dari bersifat internal, yaitu berasal dari pelaksana program sendiri, ataupun eksternal, yaitu pihak luar atau independen.

5. Melaksanakan evaluasi. Kegiatan inti dalam evaluasi adalah pengumpulan dan analisis data serta penulisan laporan evaluasi. Oleh karena itu, pengawasan kualitas data dan analisis sangat krusial untuk memperoleh kualitas evaluasi yang baik. Dalam penulisan laporan, penting untuk memperhatikan kaidah-kaidah penulisan ilmiah agar dihasilkan suatu laporan evaluasi yang baik, baik dilihat dari segi substansi maupun tata bahasa.
6. Mendiseminasikan hasil evaluasi. Laporan evaluasi umumnya bersifat teknis, sehingga mungkin sulit dimengerti oleh orang awam. Agar hasil evaluasi dapat digunakan seoptimal mungkin, perlu dibuat versi ringkas dari laporan yang berfokus pada temuan utama dan menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh umum.
7. Menggunakan hasil evaluasi. Hasil evaluasi dapat memberikan rekomendasi berupa tuntutan perubahan, baik dalam pelaksanaan atau bahkan dalam desain program. Perubahan yang disarankan adalah untuk membuat program menjadi lebih efektif dalam upaya mencapai tujuan-tujuannya. Lebih dari itu, hasil evaluasi juga memberikan pembelajaran bagi organisasi pelaksana program secara keseluruhan agar pelaksanaan program-program di masa depan dapat menjadi lebih baik. Pembelajaran dari hasil evaluasi juga akan sangat berguna bagi penyusunan program atau kebijakan baru.

B. Program PUAP

PUAP merupakan program dari Kementerian Pertanian untuk mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui pengembangan usaha agribisnis di pedesaan. Pelaksanaan program PUAP terkait banyaknya masyarakat miskin tinggal di pedesaan dengan mata pencaharian utamanya adalah pertanian. Keterbatasan kualitas sumberdaya manusia dan kurangnya modal membuat pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan memberikan bantuan modal usaha melalui program PUAP. PUAP merupakan bagian dari pelaksanaan program PNPM Mandiri yang melakukan penyaluran bantuan modal usaha dalam upaya menumbuhkembangkan usaha agribisnis sesuai dengan potensi pertanian desa sasaran, yang diwujudkan dengan penerapan pola bentuk fasilitas bantuan

penguatan modal usaha untuk petani, baik petani pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani

Pengertian Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) menurut Pedoman PUAP (2014) adalah kumpulan beberapa kelompok tani yang tergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha. Sedangkan pengertian kelompok tani sendiri yaitu kumpulan petani/peternak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumberdaya) dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota (Kementerian Pertanian, 2014). Gapoktan diharapkan dapat berperan untuk fungsi-fungsi pemenuhan permodalan pertanian, pemenuhan sarana produksi, pemasaran produk pertanian dan termasuk untuk menyediakan berbagai informasi yang dibutuhkan petani. Tujuan utama pembentukan dan pemberdayaan gapoktan adalah untuk memperkuat kelembagaan petani yang ada, sehingga pembinaan pemerintah kepada petani akan terfokus dengan sasaran yang jelas (Pasaribu dkk, 2011).

Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis (LKM-A) merupakan lembaga keuangan mikro yang ditumbuhkan dari gapoktan pelaksana PUAP dengan fungsi utamanya adalah untuk mengelola aset dasar dari dana PUAP dan dana keswadayaan anggota (Pasaribu dkk, 2011). Dana yang dikelola LKMA dimanfaatkan secara maksimal untuk membiayai usaha agribisnis anggota. Pengukuran kinerja aspek manajemen pengelolaan LKM-A pada gapoktan merupakan suatu kegiatan untuk mengetahui pola pengelolaan keuangan (manajemen keuangan) di tingkat gapoktan PUAP oleh pengurus. maksimal sebesar Rp. 100 juta. Dana tersebut disalurkan ke setiap anggota Gapoktan untuk menunjang kegiatan usaha taninya. Dengan demikian, Gapoktan diharapkan mampu menjadi lembaga ekonomi yang dimiliki dan dikelola oleh petani. Beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh Gapoktan sebagai penyalur PUAP antara lain : memiliki sumber daya manusia yang mampu mengelola usaha agribisnis, struktur kepengurusan yang aktif, dimiliki dan dikelola oleh petani, dan dikukuhkan oleh bupati atau walikota (Pasaribu dkk, 2011).

Indikator keberhasilan output antara lain:

1. Tersalurkannya dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PUAP kepada petani, buruh tani dan rumah tangga tani miskin anggota gapoktan sebagai modal usaha untuk melakukan usaha produktif pertanian; dan

2. Terlaksananya fasilitasi penguatan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia pengelola gapoktan, penyuluh pendamping dan penyelia mitra tani.

Indikator keberhasilan outcome antara lain:

1. Meningkatnya kemampuan gapoktan dalam memfasilitasi dan mengelola bantuan modal usaha untuk petani anggota baik pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani;
2. Meningkatnya jumlah petani, buruh tani dan rumah tangga tani yang mendapatkan bantuan modal usaha;
3. Meningkatnya aktivitas kegiatan agribisnis (hulu, budidaya dan hilir) di perdesaan;

Berdasarkan indikator-indikator tersebut, maka untuk menilai keberhasilan program PUAP, akan digunakan salah satu indikator yang dianggap bisa mewakili keberhasilan program tersebut.

III. METODOLOGI

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Kalimantan Selatan. Waktu pelaksanaan penelitian adalah bulan Februari Tahun 2014. Pertimbangan di laksanakan evaluasi program PUAP di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu dikarenakan belum pernah dilakukan evaluasi Program PUAP sejak pertama digulirkan sampai dengan tahun 2014.

B. Metode Pengumpulan Data

Dilihat dari sumber datanya, pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan menggunakan instrument kuesioner melalui teknik wawancara dengan pengurus gapoktan PUAP. Wawancara mendalam perlu dilakukan untuk mendapatkan informasi tentang proses penyaluran dan perkembangan dana PUAP serta factor-faktor yang mempengaruhinya. Data sekunder diperoleh dari BPS dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Berdasarkan jenisnya, data yang dikumpulkan adalah data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif yang di kumpulkan meliputi data perkembangan penyaluran dana BLM-PUAP dan data Perkembangan aset PUAP. Sedangkan data kualitatif yang dikumpulkan adalah gejala gejala yang timbul dalam pelaksanaan Program PUAP.

C. Metode Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel lokasi dilakukan dengan metode purposive, yaitu mengambil sampel dengan melihat tujuan penelitian. Penelitian dilakukan terhadap gapoktan penerima BLM-PUAP di Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Hulu Sungai Utara, Tapin, Tanah Laut, Kota Banjarbaru dan Kota Banjarmasin. Gapoktan yang menjadi obyek penelitian yaitu gapoktan yang menerima PUAP mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Hal ini didasari gapoktan 2008 sampai dengan 2012 telah melaksanakan sosialisasi, penyaluran dan pengembangan kelembagaan.

D. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah diskriptif analitis yaitu dimaksudkan untuk eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial, dengan jalan mendeskripsikan sejumlah variabel yang berkenaan dengan masalah dan unit yang diteliti.

1. Analisis keberhasilan output

Indikator keberhasilan output antara lain :

- a. Terlaksananya fasilitasi penguatan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia pengelola gapoktan, penyuluh pendamping dan penyelia mitra tani.
- b. Tersalurkannya dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) PUAP kepada petani, buruh tani dan rumah tangga tani miskin anggota gapoktan sebagai modal usaha untuk melakukan usaha produktif pertanian.

Untuk melakukan analisis terlebih dahulu perlu menetapkan kriteria.

Kriteria tersebut dibagi menjadi 3 kategori yaitu baik, cukup dan kurang.

Kategori baik, cukup dan kurang dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Kategori baik bila dana peminjam dari Gapoktan macet <10%
- 2) Kategori cukup: bila dana peminjam dari Gapoktan macet antara 10% s/d 50%
- 3) Kategori kurang : bila dana peminjam dari Gapoktan macet >50%

2. Analisis keberhasilan outcome

Indikator keberhasilan outcome antara lain :

- a. Meningkatnya kemampuan gapoktan dalam memfasilitasi dan mengelola bantuan modal usaha untuk petani anggota baik pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani;

Untuk mengukur peningkatan kemampuan gapoktan dalam memfasilitasi dan mengelola modal usaha penulis melihat dari dua aspek yaitu :

1) Aspek usaha

Peningkatan kemampuan gapoktan dalam aspek usaha dapat dilihat dengan cara melihat perkembangan aset gapoktan. Untuk

memberikan penilaian perlu ditetapkan kriteria. Kriteria yang digunakan antara lain baik, cukup dan kurang

- a) apabila kenaikan aset gapoktan melebihi 6%/ tahun maka dikategorikan baik,
- b) apabila kenaikan aset antara 1 sampai dengan 6% per tahun maka dikategorikan sedang
- c) namun jika kenaikan aset kurang dari 1% pertahun maka dikategorikan buruk

2) Aspek kelembagaan

Gapoktan PUAP diharapkan berkembang menjadi lembaga keuangan mikro agribisnis (LKM-A). keberhasilan dalam menumbuhkan LKM-A akan menjadi salah satu tolak ukur keberhasilan program PUAP.

- b. Meningkatnya jumlah petani, buruh tani dan rumah tangga tani yang mendapatkan bantuan modal usaha;

Jumlah petani yang mendapatkan fasilitas pinjaman pembiayaan PUAP menjadi salah satu indikator keberhasilan outcome program PUAP. Perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\text{Peningkatan petani difasilitasi} = \frac{\text{jumlah petani peminjam}}{\text{Jumlah semua anggota}} \times 100\%$$

- c. Meningkatnya aktivitas kegiatan agribisnis (hulu, budidaya dan hilir) di perdesaan;

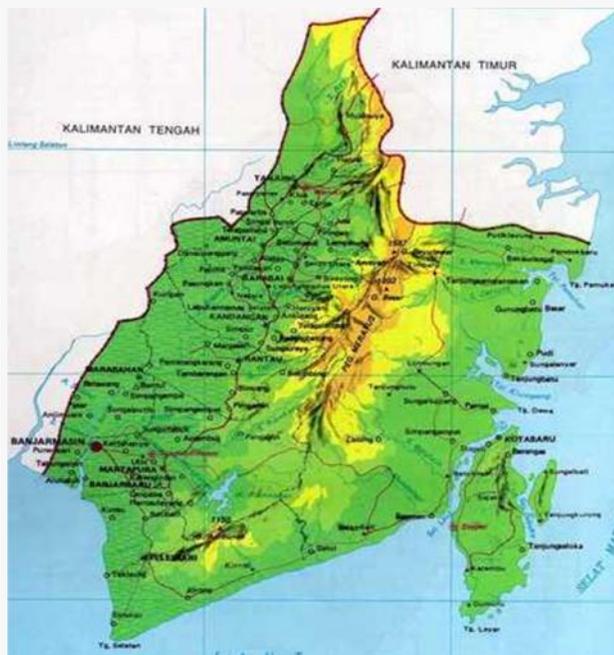
Aktivitas kegiatan agribisnis digali melalui Rencana usaha anggota, kemudian direkap menjadi rencana usaha kelompok (RUK) selanjutnya menjadi Rencana Usaha Bersama (RUB). Semua RUB akan direkap perkabupaten sehingga akan terlihat alokasi pembiayaan dari pinjaman BLM-PUAP.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Wilayah

Provinsi Kalimantan Selatan secara geografis, terletak di antara 114 19' 13" - 116 33' 28" Bujur Timur dan 1 21' 49" - " 4 10' 14" Lintang Selatan. Secara administratif, Provinsi Kalimantan Selatan terletak di bagian selatan Pulau Kalimantan dengan batas-batas : Sebelah barat dengan Provinsi Kalimantan Tengah, sebelah timur dengan Selat Makasar, sebelah selatan dengan Laut Jawa dan sebelah utara dengan Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan letak tersebut, luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan hanya 6,98 persen dari luas Pulau Kalimantan secara keseluruhan.

Secara administratif wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dengan kota Banjarmasin sebagai ibukotanya, meliputi 11 kabupaten dan 2 kota. Kabupaten terbaru adalah Kabupaten Tanah Bumbu (pecahan Kabupaten Kotabaru) dan Kabupaten Balangan (pecahan Kabupaten Hulu Sungai Utara). Persentase luas tertinggi adalah Kabupaten Kotabaru (25,11%); Kabupaten Tanah Bumbu (13,50%) dan terendah adalah Kota Banjarmasin (0,19%) dan Kota Banjarbaru (0,98%). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini.



Gambar 1. Peta Kalimantan Selatan

Temperatur udara di suatu tempat antara lain ditentukan oleh tinggi rendahnya tempat tersebut terhadap permukaan laut dan jaraknya dari pantai. Temperatur rata-rata di daerah Kalimantan Selatan pada tahun 2004 berkisar antara 23,30C sampai 32,70C. Sedangkan kelembaban udara rata-ratanya berkisar antara 47%-s.d 98% tiap bulan. Curah hujan tertinggi di daerah ini terjadi pada bulan Januari yaitu 626,1 mm sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Agustus yaitu 0,0 mm. Jumlah hari hujan selama tahun 2004 adalah 181 hari dengan hari terbanyak hujan terjadi pada bulan Januari yaitu 27 hari. Rata-rata tekanan udara di daerah ini berkisar antara 1.009,3 mm-1.013,6 mm selama tahun 2004.

B. Pelaksanaan Program PUAP di Kalimantan Selatan

Provinsi Kalimantan Selatan mendapatkan program BLM-PUAP sejak tahun 2008. Sampai saat ini Provinsi Kalimantan Selatan telah menerima alokasi BLM-PUAP sebanyak 1.487 Gapoktan (74%) atau sebesar Rp.148.700.000.000,-. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat ditabel 1 berikut .

Tabel 1. Rekapitulasi gapoktan penerima BLM-PUAP di Kalimantan Selatan

| Kabupaten/Kota | Jumlah Gapoktan | | | | | | | Jumlah | jumlah desa |
|---------------------|-----------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|--------------|--------------|
| | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | | |
| Balangan | 28 | 18 | 21 | 21 | 10 | 3 | 4 | 105 | 157 |
| Banjar | 35 | 23 | 51 | 25 | 29 | 14 | 6 | 183 | 290 |
| Barito Kuala | 35 | 17 | 47 | 48 | 13 | 16 | 7 | 183 | 201 |
| Hulu Sungai Selatan | 30 | 20 | 34 | 20 | 16 | 8 | 4 | 132 | 148 |
| Hulu Sungai Tengah | 35 | 18 | 26 | 17 | 19 | 16 | 5 | 136 | 169 |
| Hulu Sungai Utara | 33 | 14 | 19 | 29 | 15 | 1 | 2 | 113 | 219 |
| Kota Banjarbaru | - | - | 8 | 4 | 1 | | | 13 | 20 |
| Kota Banjarmasin | - | - | - | 5 | 5 | 7 | 2 | 19 | 52 |
| Kotabaru | 35 | 27 | 21 | 41 | 28 | 5 | 5 | 162 | 202 |
| Tabalong | 29 | 11 | 28 | 18 | 15 | | 5 | 106 | 131 |
| Tanah Bumbu | 22 | 40 | 37 | 13 | 5 | 1 | | 118 | 150 |
| Tanah Laut | 30 | 24 | 31 | 20 | 6 | | 5 | 116 | 135 |
| Tapin | 29 | 18 | 19 | 22 | 8 | | 5 | 101 | 134 |
| Jumlah | 341 | 230 | 342 | 283 | 170 | 71 | 50 | 1,487 | 2,008 |

Sumber : Sekretariat Tim Pembina PUAP Provinsi Kalimantan Selatan

Organisasi pelaksana Program PUAP

1. Tingkat Pusat

Menteri Pertanian membentuk Tim PUAP Pusat yang diketuai oleh Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP). Sekretariat Tim PUAP Pusat bertempat di Direktorat Pembiayaan Pertanian dengan Direktur Pembiayaan Pertanian sebagai sekretaris dan pejabat eselon 1 lingkup Kementerian Pertanian sebagai anggota.

2. Tingkat Provinsi

Gubernur membentuk Tim Pembina PUAP Provinsi diketuai oleh kepala dinas pertanian provinsi. Kedudukan sekretariat Tim Pembina PUAP Provinsi di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) dengan kepala BPTP sebagai sekretaris dan kepala dinas/ badan lingkup pertanian provinsi sebagai anggota.

3. Tingkat Kabupaten

Bupati/ Walikota membentuk Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota yang diketuai oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/ Kota. Kedudukan sekretariat Tim Teknis PUAP Kabupaten diserahkan kepada kebijakan ketua dengan kepala badan pelaksana penyuluhan selaku sekretaris. Kepala dinas/ badan lingkup pertanian kabupaten/ kota selaku anggota. Salah satu anggota tim teknis PUAP Kabupaten/kota adalah Penyelia Mitra Tani (PMT).

4. Tingkat Kecamatan

Camat membentuk Tim Teknis PUAP kecamatan yang diketuai oleh camat dan dibantu kepala Balai Penyuluhan Kecamatan (BPK) sebagai sekretaris dan kepala desa sebagai anggota.

5. Tingkat Desa

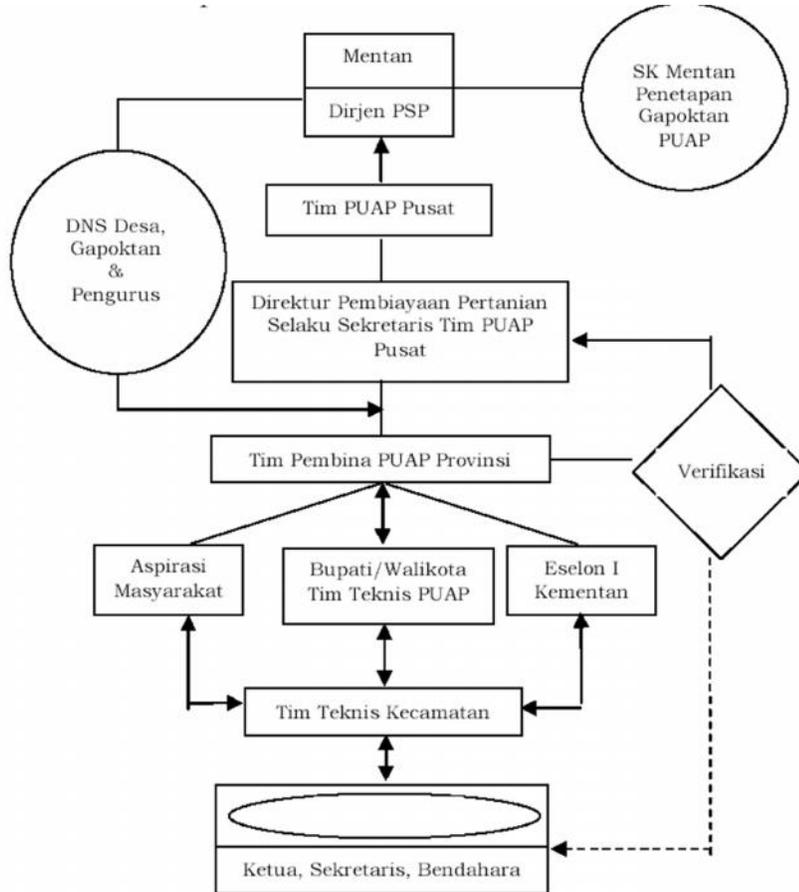
Pelaksana PUAP tingkat desa adalah Gapoktan dan didampingi oleh PMT dan penyuluh pendamping.

Pelaksanaan Program PUAP di Kalimantan Selatan meliputi :

1. Pengusulan

Berdasarkan pedoman PUAP 2014, calon penerima BLM-PUAP dapat diusulkan oleh komisi empat DPR RI, Pemerintah daerah atau eselon 1 Kementerian Pertanian. Usulan oleh komisi empat DPR RI dan Eselon 1 Kementerian Pertanian langsung disampaikan kepada Tim PUAP Pusat. Sedangkan usulan dari pemerintah daerah dilaksanakan secara berjenjang.

Bupati/ walikota melalui pejabat yang ditunjuk (Kepala Dinas Pertanian) mengusulkan calon gapoktan penerima BLM-PUAP kepada Tim Pembina PUAP Provinsi untuk diteruskan kepada Tim PUAP Pusat. Alur pengusulan gapoktan calon penerima BLM-PUAP dapat dilihat di gambar 2 di bawah ini.



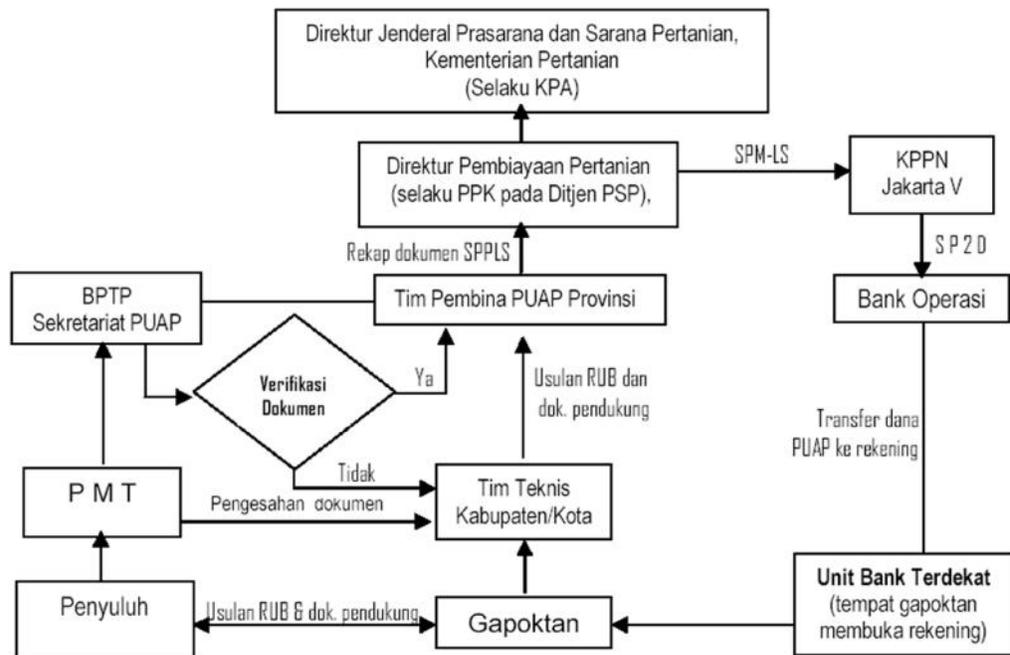
Gambar 2. Alur usulan calon gapoktan penerima BLM-PUAP

2. Verifikasi dan pemberkasan

Setelah Tim PUAP pusat menerima usulan calon gapoktan penerima PUAP akan melakukan seleksi dengan memperhatikan jumlah desa, jumlah alokasi anggaran, potensi daerah dan dukungan pemda. Kemudian Tim PUAP Pusat menerbitkan Daftar Nominatif Sementara (DNS) Gapoktan calon penerima PUAP. Hal ini berbeda dengan sebelum tahun 2012, dimana Tim PUAP Pusat langsung mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Pertanian tentang penetapan Gapoktan Penerima PUAP.

Tim Pembina PUAP Provinsi akan meneruskan DNS gapoktan calon penerima PUAP kepada Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota untuk dilakukan verifikasi factual mengenai keberadaan gapoktan, pengurus dan potensi

pertanian. Apabila dinyatakan lolos verifikasi factual, maka gapoktan dibimbing oleh Penyuluh Pendamping dan PMT menyusun pemberkasan dokumen pencairan PUAP. Berkas tersebut disampaikan ke Tim PUAP Pusat melalui Kabupaten/Kota dan provinsi untuk dilakukan verifikasi dokumen. Setelah dokumen dinyatakan memenuhi syarat Menteri Pertanian melalui Dirjen PSP menerbitkan SK menetapkan gapoktan penerima BLM-PUAP. Setelah itu direktur pembiayaan pertanian selaku pejabat pembuat komitmen (PPK) pada Ditjen PSP akan menerbitkan surat perintah membayar langsung (SPM-LS) kepada KPPN Jakarta V. selanjutnya KPPN Jakarta V menerbitkan SP2D kepada bank untuk transfer dana PUAP ke rekening gapoktan. alur verifikasi dokumen pencairan dana BLM-PUAP dan proses transfer ke rekening gapoktan ditampilkan pada gambar 3.



Gambar 3. Alur proses verifikasi dokumen pencairan dana BLM-PUAP dan proses transfer dana ke rekening gapoktan.

3. Sosialisasi dan pelatihan

Sosialisasi dan pelatihan merupakan upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pengurus gapoktan dalam mengelola PUAP. Sosialisasi dan pelatihan menjadi salah satu syarat pencairan disamping

kebijakan Tim Teknis Kabupaten/Kota yang lainnya. Kegiatan pelatihan ini menjadi tupoksi dari Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian (BPPSDMP) melalui Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP). Pada tahun 2014 BPPSDMP tidak menyelenggarakan pelatihan untuk gapoktan PUAP. Oleh karena itu kegiatan pelatihan dilaksanakan oleh Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota.

4. Pencairan dan Penyaluran

Pencairan dana BLM-PUAP dilakukan setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Teknis PUAP Kabupaten/Kota. Setiap Kabupaten/Kota mempunyai kebijakan sendiri untuk memberikan rekomendasi sesuai dengan pertimbangan tertentu. Namun secara umum rekomendasi diberikan setelah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Sudah mengikuti sosialisasi dan pelatihan
- b. Menyusun dan menyampaikan rencana usaha anggota (RUA), rencana usaha kelompok (RUK) dan rencana usaha bersama (RUB)

Penyaluran dana BLM-PUAP sepenuhnya menjadi tugas dan tanggung jawab organisasi gapoktan sebagai pelaksana PUAP. Untuk menjalankan kegiatan simpan pinjam, Gapoktan mendirikan unit usaha otonom simpan pinjam yang selanjutnya disebut lembaga keuangan mikro agribisnis (LKM-A).

5. Pendampingan dan pembinaan

Pendampingan dan pembinaan secara intensif dilakukan oleh penyuluh pendamping (PP) dan penyelia mitra tani (PMT). PP akan lebih banyak mendampingi terhadap usaha produktif anggota sedangkan PMT akan lebih banyak mendampingi dalam hal pengelolaan lembaga keuangan mikro-agribisnis (LKM-A).

6. Evaluasi dan pelaporan

Evaluasi pelaksanaan kegiatan PUAP dilakukan oleh tim monev, baik tim monev pusat, provinsi maupun kabupaten. Tim teknis PUAP Kabupaten/ kota dan tim Pembina PUAP Provinsi membuat laporan dibantu PMT untuk disampaikan kepada Tim PUAP Pusat sebagai bagian dari laporan PNPM-Mandiri.

C. Evaluasi Output

Indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilan output antara lain terlaksananya fasilitasi penguatan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia pengelola gapoktan, penyuluh dan PMT dan tersalurkannya dana PUAP kepada petani, buruh tani dan rumah tangga tani miskin anggota gapoktan sebagai modal untuk melakukan usaha produktif pertanian.

Fasilitasi penguatan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia pengelola gapoktan, penyuluh dan PMT dilaksanakan oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian (BPPSDMP) melalui unit pelaksana teknis (UPT) Balai Besar Pelatihan Pertanian (BBPP) dan Pusat Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan Pertanian (PPMKP). Kegiatan pelatihan terhadap Pengurus Gapoktan, PMT dan Trainer of training (TOT) penyuluh pendamping (PP) menjadi program tahunan di BPPSDMP. Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa semua gapoktan penerima PUAP Tahun 2008 sampai dengan 2012 sudah mendapatkan sosialisasi dan pelatihan. Selain pengurus gapoktan BPPSDMP juga melaksanakan pelatihan untuk tenaga pendamping PUAP yaitu TOT PP dan PMT.

Pada tahun 2014 jumlah PMT Program PUAP di Kalimantan Selatan berjumlah 46 orang. Dengan rasio jumlah PMT dan jumlah gapoktan rata-rata 1: 32 dengan rasio tertinggi di Kabupaten Kotabaru yaitu 1 PMT berbanding 54 gapoktan sedangkan rasio terendah di Kota Banjarbaru yaitu 1 PMT berbanding 19 gapoktan. Data ketersediaan tenaga PMT dibanding jumlah gapoktan disajikan pada tabel 2.

Tabel 2. Data ketersediaan tenaga PMT dibanding jumlah gapoktan

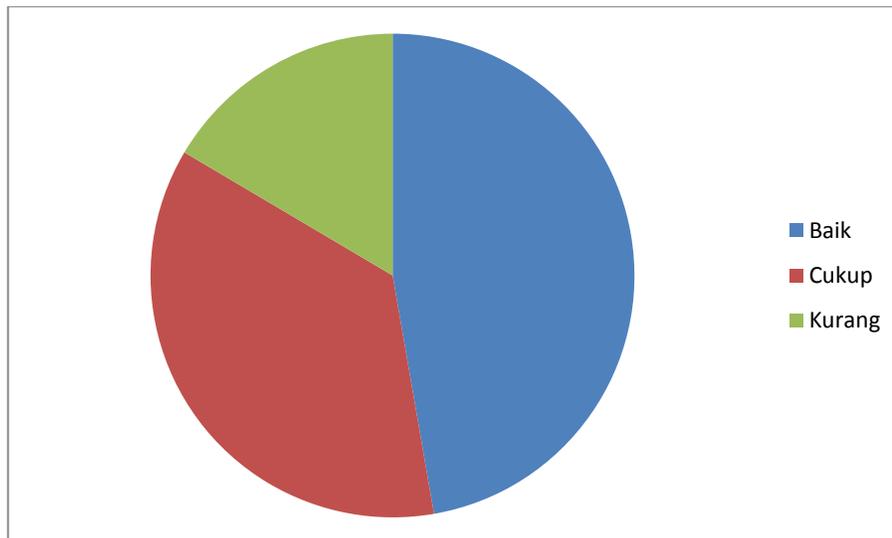
| Kabupaten/ Kota | Jumlah PMT | Jumlah Gapoktan | Rasio Jml PMT daan Gapoktan |
|---------------------|------------|-----------------|-----------------------------|
| Balangan | 4 | 105 | 1:26 |
| Banjar | 5 | 183 | 1:37 |
| Barito Kuala | 4 | 183 | 1:46 |
| Hulu Sungai Selatan | 4 | 132 | 1:33 |
| Hulu Sungai Tengah | 5 | 136 | 1:27 |
| Hulu Sungai Utara | 4 | 113 | 1:28 |
| Kota Banjarbaru | 1 | 13 | 1:13 |
| Kota Banjarmasin | 1 | 19 | 1:19 |
| Kotabaru | 3 | 162 | 1:54 |
| Tabalong | 3 | 106 | 1:35 |

| | | | |
|---------------|-----------|--------------|-------------|
| Tanah Bumbu | 4 | 118 | 1:30 |
| Tanah Laut | 5 | 116 | 1:23 |
| Tapin | 3 | 101 | 1:34 |
| Jumlah | 46 | 1,487 | 1:32 |

Sumber : Sekretariat Tim Pembina PUAP Provinsi Kalimantan Selatan

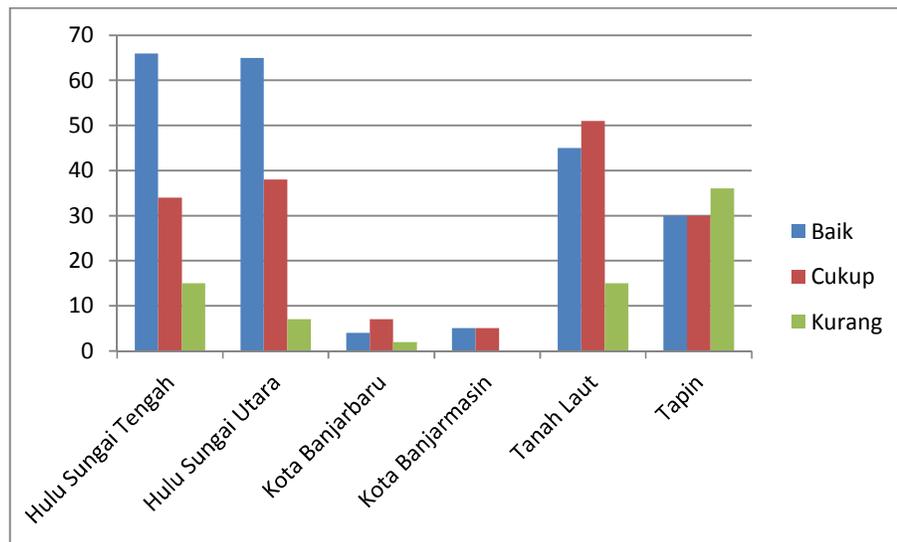
Untuk melaksanakan evaluasi output yang kedua yaitu tersalurkannya dana PUAP kepada petani, buruh tani dan rumah tangga tani miskin anggota gapoktan sebagai modal untuk melakukan usaha produktif pertanian, peneliti telah menetapkan kriteria untuk memberikan penilaian terhadap gapoktan dalam hal penyaluran pinjaman anggota. Kriteria baik diberikan jika dana macet kurang dari 10%, kriteria cukup jika dana macet antara 10% sampai dengan 50% dan kriteria kurang jika dana macet lebih dari 50%.

Berdasarkan evaluasi penyaluran pinjaman dana PUAP terhadap gapoktan penerima PUAP tahun 2008 sampai dengan 2012 di Provinsi Kalimantan Selatan, diketahui bahwa sebanyak 215 gapoktan (47,3%) mempunyai kriteria baik dalam penyaluran dana PUAP. Gapoktan yang mempunyai kriteria cukup sebanyak 165 gapoktan (36,3%) dan sebanyak 75 gapoktan (16,5%) mempunyai kriteria kurang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 4.



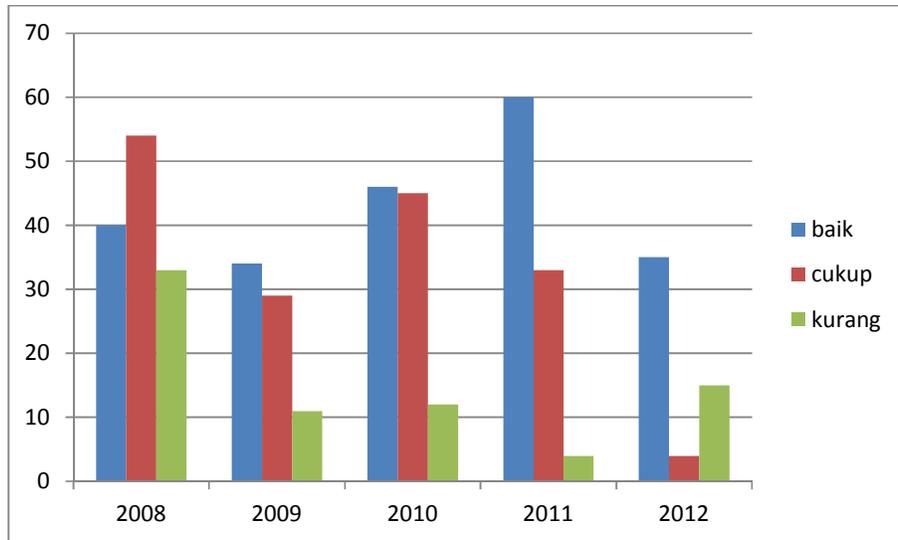
Gambar 4. Persentase criteria gapoktan 2008-2012 berdasarkan penyaluran

Apabila dilihat penyaluran dana PUAP per kabupaten/ kota dapat dikatakan bahwa penyaluran di Kabupaten Hulu Sungai Utara terbaik diantara kabupaten kota yang lain yaitu sebanyak 65 dari 110 gapoktan (59,1%) mempunyai criteria baik. Untuk kabupaten kota yang lain berturut-turut adalah 66 dari 115 gapoktan (57,4%) untuk Kabupaten Hulu Sungai Tengah, 5 dari 10 gapoktan (50%) untuk Kota Banjarmasin, 45 dari 111 gapoktan (40,5%) untuk Kabupaten Tanah Laut, 30 dari 96 gapoktan (31,3%) untuk Kabupaten Tapin, dan 4 dari 13 gapoktan (30,8%) untuk Kota Banjarbaru. Data rekapitulasi kriteria gapoktan per kabupaten dalam penyaluran kota disajikan pada gambar 5 di bawah ini.



Gambar 5. Rekapitulasi jumlah gapoktan dalam kriteria penyaluran dana PUAP per Kabupaten kota

Penyaluran ditahun 2012 lebih baik dari tahun 2011. Pada tahun 2012 jumlah gapoktan yang memiliki kriteria baik dalam penyaluran sebesar 64,8% sedangkan di tahun 2011 hanya sebesar 61,9%. Begitu pula penyaluran 2011 lebih baik dibandingkan tahun 2010 yakni sebesar 44,7%. Oleh karena itu, dapat dikatakan pelaksanaan penyaluran dana PUAP dari tahun ke tahun terjadi tren peningkatan penyaluran yang semakin baik. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 6 dibawah ini.



Gambar 6. Rekapitulasi jumlah gapoktan berdasarkan penyaluran dilihat pertahun.

Peningkatan keberhasilan penyaluran disebabkan adanya perbaikan-perbaikan pelaksanaan Program PUAP baik dari sosialisasi, pelatihan, pendampingan dan pembinaan. Pada tahun awal dilaksanakan Program PUAP kebanyakan masyarakat beranggapan bahwa dana PUAP adalah bantuan pemerintah yang tidak perlu dikembalikan. Anggapan seperti inilah yang menyebabkan penyaluran dana PUAP mempunyai kriteria kurang. Namun dalam perkembangannya dengan berbagai pendekatan dan sosialisasi masyarakat semakin sadar bahwa dana PUAP bukan dana habis pakai tapi untuk dikembangkan sebagai modal simpan pinjam. Melalui wawancara mendalam diketahui faktor-faktor yang menyebabkan penyaluran dana PUAP memiliki penilaian kurang atau macet lebih dari 50% antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran dan kedisiplinan anggota

Sebesar 56% penyaluran dana PUAP memiliki kriteria kurang (macet > 50%) dikarenakan kesadaran dan kedisiplinan anggota rendah. Kesadaran anggota rendah dapat dilihat dari sikap anggota yang menganggap dana PUAP adalah bantuan pemerintah sehingga tidak perlu dikembalikan.

2. Kegagalan usaha (gagal panen)

Sebesar 25% penyaluran dana PUAP mempunyai kriteria kurang disebabkan kegagalan usaha. Anggota yang gagal panen selalu enggan untuk membayar cicilan pinjaman sehingga dana PUAP menjadi macet.

3. Bencana alam dan wabah penyakit

Sebesar 5% penyaluran dana PUAP mempunyai kriteria kurang disebabkan oleh bencana alam seperti banjir dan wabah flu burung.

4. Keteladanan pengurus dan tokoh masyarakat

Sebesar 9% penyebab kemacetan penyaluran dana PUAP adalah minimnya keteladanan pengurus dan tokoh masyarakat. Minimnya keteladanan ini dapat dilihat dari tindakan pengurus dan tokoh masyarakat yang menyalahi aturan. Sebagai contoh peminjaman oleh pengurus atau tokoh masyarakat melebihi plafon. Selain itu sikap pengurus atau tokoh masyarakat yang tidak mengembalikan pinjaman akan diikuti oleh anggota.

5. Tindakan criminal

Kemacetan penyaluran dana PUAP sebesar 5% disebabkan oleh tindakan criminal. Tindakan criminal tersebut bisa dilakukan pengurus atau pengelola, aparat dan petugas atau pihak yang lain. Tindakan criminal biasanya berupa penggelapan oleh pengurus/ pengelola, peminjaman oleh aparat/ petugas tanpa melalui prosedur yang seharusnya, penipuan dan penjabretan oleh pelaku kriminalitas lainnya

D. Evaluasi Outcome

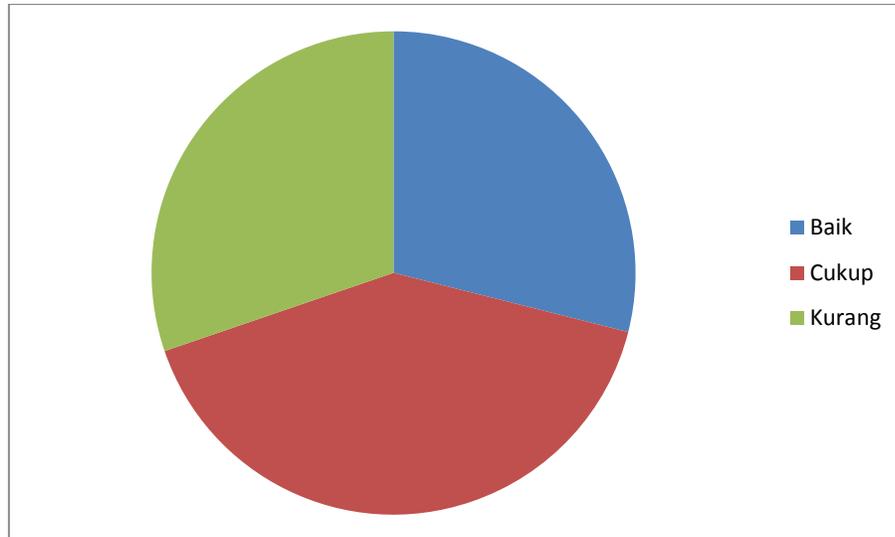
Indikator keberhasilan outcome antara lain: Meningkatnya kemampuan gapoktan dalam memfasilitasi dan mengelola bantuan modal usaha untuk petani anggota baik pemilik, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga tani; Meningkatnya jumlah petani, buruh tani dan rumah tangga tani yang mendapatkan bantuan modal usaha; Meningkatnya aktivitas kegiatan agribisnis (hulu, budidaya dan hilir) di perdesaan.

Peningkatan kemampuan gapoktan dalam memfasilitasi dan mengelola bantuan modal usaha dapat dilihat dari dua aspek yaitu aspek pengembangan asset gapoktan dan aspek kelembagaan.

1. Aspek pengembangan aset

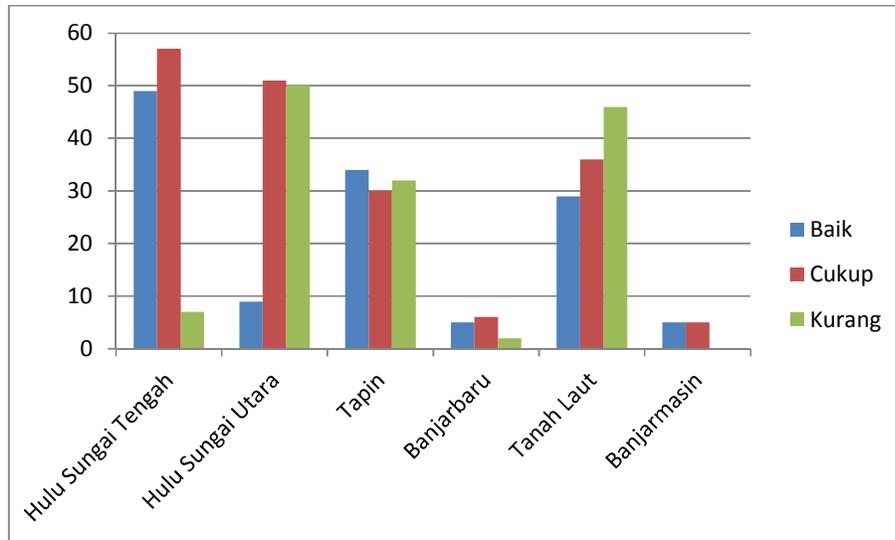
Untuk melihat gapoktan berdasarkan perkembangan aset, telah ditetapkan 3 kriteria gapoktan yaitu kriteria baik, kriteria cukup dan kriteria kurang. Kriteria baik ditetapkan jika kenaikan aset sebesar 6% pertahun, kriteria cukup ditetapkan jika kenaikan aset antara 1% sampai dengan 5%, dan kriteria kurang ditetapkan jika kenaikan aset kurang dari 1%. Berdasarkan hasil evaluasi outcome, diketahui bahwa sebanyak 28,9% gapoktan di Kalimantan Selatan

mempunyai kriteria baik, sebanyak 40,8% mempunyai kriteria sedang, dan sebanyak 30,2% mempunyai kriteria kurang. Untuk lebih jelasnya jumlah gapoktan berdasarkan kriteria perkembangan aset disajikan pada gambar 7.



Gambar 7. Jumlah gapoktan berdasarkan kriteria perkembangan aset.

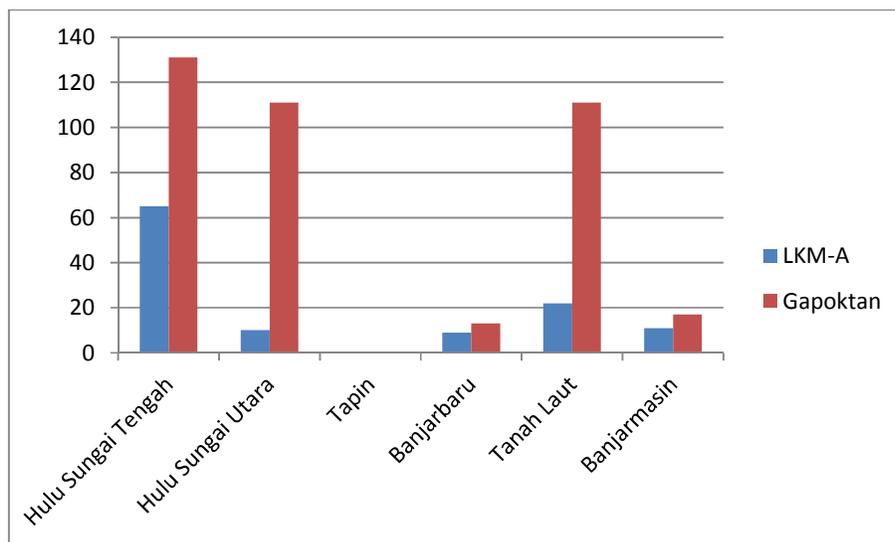
Apabila dilihat perkabupaten kota, maka dapat dikatakan Kota Banjarmasin memiliki jumlah gapoktan dengan peningkatan aset dengan kriteria baik dengan jumlah terbanyak yaitu 5 gapoktan dari 10 gapoktan atau sebesar 50%. Kemudian disusul Kabupaten Hulu Sungai Tengah dengan jumlah gapoktan 49 dari 113 gapoktan atau sebesar 43,4%. Informasi keragaan jumlah gapoktan yang mempunyai kriteria baik, cukup dan kurang per kabupaten/ kota disajikan dalam gambar 8.



Gambar 8. Jumlah gapoktan berdasarkan perkembangan aset per kabupaten/ kota

2. Aspek kelembagaan

Evaluasi program PUAP dari aspek kelembagaan dapat dilihat seberapa jauh gapoktan dapat menumbuhkembangkan lembaga keuangan mikro agribisnis (LKM-A). Keberhasilan penumbuhan LKM-A disajikan pada gambar 9 di bawah ini.

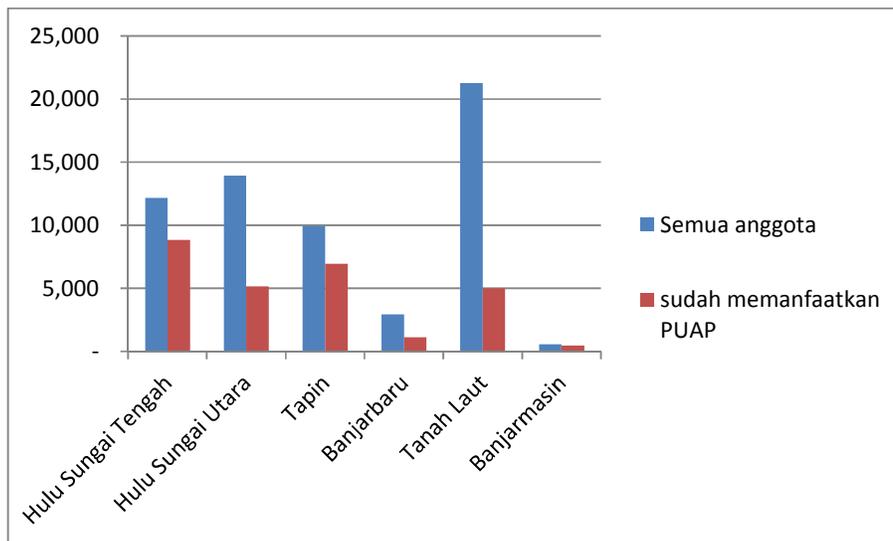


Gambar 9. Rekapitulasi keberhasilan penumbuhan LKM-A

Berdasarkan tabel di atas, rata-rata keberhasilan penumbuhan LKM-A sebesar 23,4%. Penumbuhan LKM-A yang paling banyak adalah kota banjarbaru yaitu sebanyak 9 dari 13 gapoktan atau sebesar 69%. Kemudian

adalah kota Banjarmasin yaitu sebanyak 11 dari 17 gapoktan atau sebesar 64%. Sedangkan penumbuhan LKM-A paling rendah pada Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu sebanyak 10 dari 111 gapoktan atau sebesar 9%. Keberhasilan Kota Banjarbaru dan Kota Banjarmasin dalam menumbuhkan LKM-A diduga disebabkan karena pendampingan dan pembinaan lebih intensif. Rasio petugas PMT dan gapoktan sebesar 1:13 untuk Kota Banjarbaru dan 1:19 untuk Kota Banjarmasin. Dengan rasio yang lebih rendah memungkinkan untuk pembinaan dan pendampingan yang lebih intensif.

Indikator keberhasilan outcome yang kedua adalah Meningkatnya jumlah petani, buruh tani dan rumah tangga tani yang mendapatkan bantuan modal usaha. Keragaan jumlah semua anggota gapoktan dan anggota gapoktan yang sudah memanfaatkan dana PUAP disajikan pada gambar 10 di bawah ini.

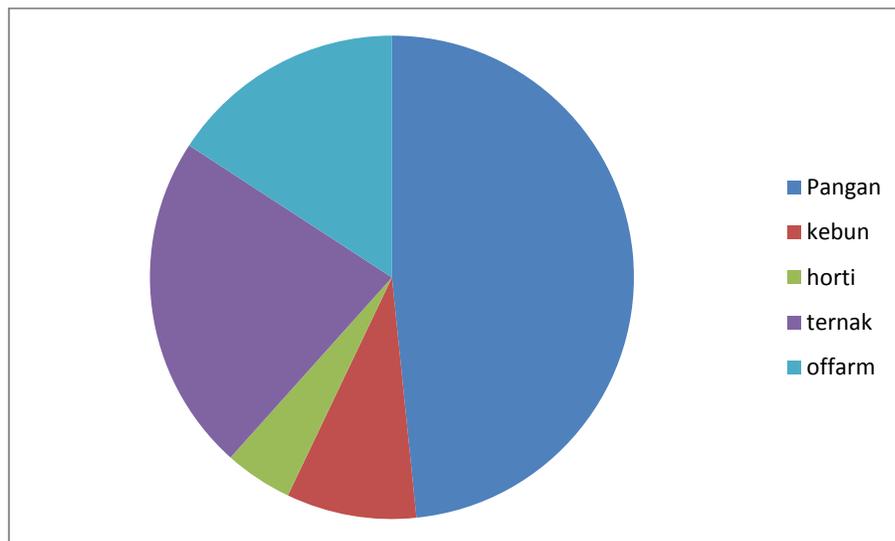


Gambar 10. Rekapitulasi anggota yang sudah memanfaatkan dana PUAP

Secara rata-rata jumlah anggota yang sudah memanfaatkan dana PUAP sebesar 45%. Jumlah anggota gapoktan terbanyak yang telah memanfaatkan dana PUAP sebesar 86% di Kota Banjarmasin sedangkan yang paling rendah sebesar 23% di Kabupaten Tanah Laut. Hal ini disebabkan oleh gapoktan di kota Banjarmasin mempunyai anggota lebih sedikit yaitu rata-rata 55 anggota per gapoktan sedangkan di Kabupaten Tanah Laut jumlah anggota rata-rata 191 anggota per anggota. Oleh karena

itu diharapkan gapoktan untuk meningkatkan dana kswadayaan dan membangun kemitraan kerjasama terhadap lain untuk meningkatkan pelayanan fasilitasi permodalan anggota.

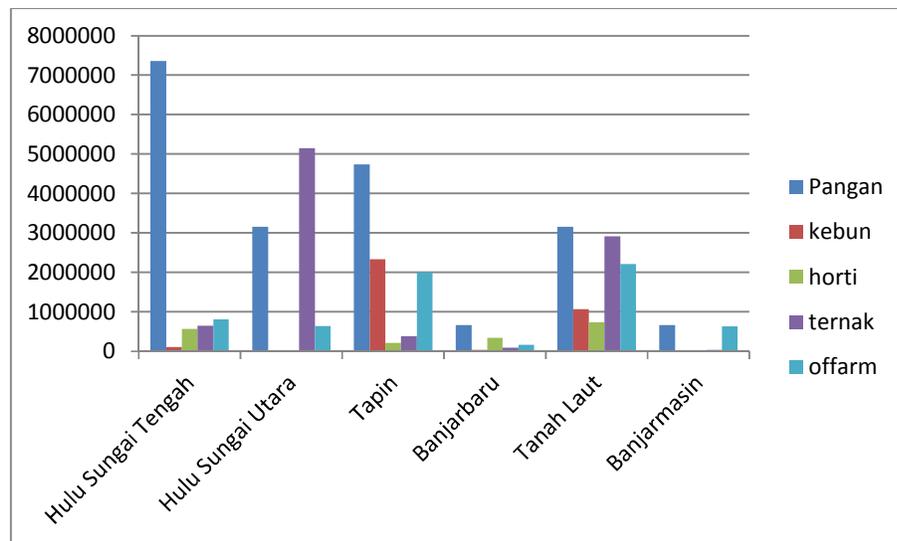
Indikator outcome yang ketiga adalah meningkatnya aktivitas kegiatan agribisnis (hulu, budidaya dan hilir) di perdesaan. Sebagian besar dana BLM-PUAP di Provinsi Kalimantan Selatan dimanfaatkan untuk usaha agribisnis tanaman pangan yaitu sebesar 48,38%. Sebesar 8,7% disalurkan untuk usaha agribisnis perkebunan, sebesar 4,5% untuk usaha agribisnis hortikultura, sebesar 22,56% untuk usaha agribisnis peternakan, dan sebesar 15,82% disalurkan untuk usaha agribisnis offfarm. Persentase pemanfaatan BLM-PUAP di Kalimantan Selatan berdasarkan usaha agribisnis disajikan pada gambar 11.



Gambar 11. Persentase pemanfaatan BLM-PUAP di Kalimantan Selatan berdasarkan usaha agribisnis

Dilihat dari pemanfaatannya per kabupaten kota , pemanfaatan terbesar BLM-PUAP untuk sektor tanaman pangan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (77,56%), sektor perkebunan di Kabupaten Tapin (24,13%), sektor hortikultura di Kota Banjarbaru (25.96%), sektor peternakan terbesar di

Kabupaten Hulu Sungai Utara (57,56%), dan sektor offfarm di Kota Banjarmasin (46,95%). Hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa pemanfaatan dana PUAP akan mengikuti potensi daerah. Sebagai contoh Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki potensi yang besar terhadap peternakan itik sehingga rencana usaha bersama (RUB) gapoktan lebih banyak untuk usaha peternakan itik. Begitu juga dengan Kota Banjarmasin, pemanfaatan dana PUAP lebih banyak di offfarm karena potensi Kota Banjarmasin adalah untuk pemasaran dan pengolahan hasil. Untuk lebih jelasnya tentang pemanfaatan dana BLM-PUAP berdasarkan usaha agribisnis dapat dilihat pada gambar 12 dibawah ini.



Gambar 12. Pemanfaatan dana BLM-PUAP berdasarkan usaha agribisnisnya dilihat per kabupaten/ kota

V. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Dari evaluasi terhadap gapoktan PUAP tahun 2008 sampai dengan 2012 dapat ditarik simpulan, antara lain :

1. Semua pengurus gapoktan penerima PUAP tahun 2008 sampai dengan 2012 sudah mendapatkan sosialisasi dan pelatihan.
2. Evaluasi penyaluran dana PUAP menunjukkan sebanyak 28,9% mempunyai kriteria baik (kemacetan < 10%), 40,8% sedang (kemacetan antara 10-50%) dan 30,2% mempunyai kriteria kurang (kemacetan > 50%).
3. Faktor yang menyebabkan gapoktan memiliki kemacetan yang tinggi antara lain : kesadaran dan kedisiplinan anggota yang rendah, kegagalan panen, bencana alam dan wabah penyakit, keteladanan pengurus pengelola dan tokoh masyarakat yang rendah dan tindakan kriminalitas
4. Evaluasi berdasarkan kemampuan gapoktan dalam melayani anggota (perkembangan aset gapoktan) adalah sebanyak 28,9% gapoktan kriteria baik (pertumbuhan aset > 6%/tahun), sebanyak 40,8% sedang (pertumbuhan aset antara 1-6%/tahun), dan sebanyak 30,2% kurang (pertumbuhan aset < 6%/tahun).
5. Keberhasilan penumbuhan LKM-A rata-rata sebesar 23,4%
6. Rata-rata jumlah anggota yang sudah memanfaatkan dana PUAP sebesar 45% dari jumlah anggota gapoktan.
7. Pemanfaatan dana PUAP berdasarkan usaha agribisnis yaitu sebesar 48,38% untuk tanaman pangan, 8,7% untuk perkebunan, 4,5% untuk hortikultura, 22,56% untuk peternakan, dan 15,82% untuk offfarm

B. Saran

Dari kesimpulan di atas maka saran yang diberikan adalah sebagai berikut :

1. Sosialisasi dan pelatihan untuk pengurus gapoktan perlu ditingkatkan dan diperbanyak materi kunjungan lapang dan praktik lapangan untuk mengasah keterampilan dalam mengelola dana PUAP.
2. Meningkatkan pembinaan dan pendampingan untuk merubah persepsi anggota gapoktan agar mengembangkan dana PUAP tersebut dan meningkatkan keswadayaan.

3. Meningkatkan pendampingan usaha produktif anggota agar kegagalan panen dapat diantisipasi.
4. Pengurus dan tokoh masyarakat harus menunjukkan teladan yang baik bagi semua anggota.
5. Meningkatkan administrasi gapoktan dan kehati-hatian dalam mengelola dana PUAP agar tetap aman.
6. Meningkatkan penumbuhan dan pemberdayaan LKM-A agar bisa memberikan pelayanan dengan lebih baik dan lebih luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Gardiner dkk. (2007). *Kumpulan Bahan Latihan Pemantauan Evaluasi Program Program Penanggulangan Kemiskinan. Modul 3 : Target, Indikator dan Basis Data.* Bappenas. Jakarta. www.ditpk.bappenas.go.id
- <http://www.indonesia.go.id/in/pemerintah-daerah/provinsi-kalimantan-selatan/profil-daerah>
- Peraturan Menteri Pertanian. 2014. *Pedoman Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) 2014.* Kementerian Pertanian. Jakarta
- Pasaribu dkk. (2011). *Penentuan Desa Calon Lokasi PUAP 2011 dan Evaluasi Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan.* Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Kementerian Pertanian. Bogor.
- Suryahadi, Asep. (2007). *Kumpulan Bahan Latihan Pemantauan Evaluasi Program-Program Penanggulangan Kemiskinan. Modul 4 : Persyaratandan Unsur-unsur Evaluasi yang Baik.* Bappenas. Jakarta. www.ditpk.bappenas.go.id